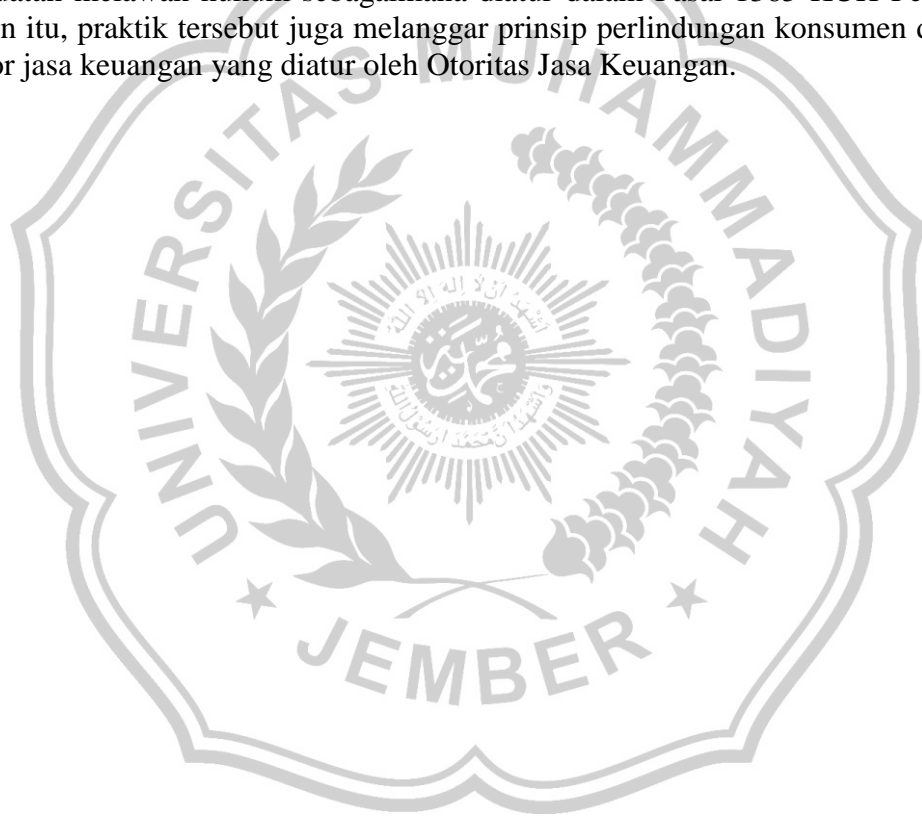


## ABSTRAK

Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.



## **ABSTRACT**

*The development of financial technology (fintech), particularly online lending services, has provided convenience for the public in obtaining funds quickly through electronic systems. However, in practice, debt collection by creditors often occurs before the installment due date agreed upon in the loan agreement. This study aims to analyze the legality of debt collection before the due date and the legal consequences arising from such practices. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that debt collection before the due date contradicts Article 1759 of the Indonesian Civil Code, which stipulates that the creditor's right to collect arises only after the debt has reached its due date. Such actions cannot be categorized as a breach of contract, but are more appropriately classified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, this practice also violates consumer protection principles in the financial services sector regulated by the Financial Services Authority.*

